BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL/TEORI

A. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian mengenai kiprah Partai Politik Islam Indonesia dalam politik, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sudharno Shobron yang berjudul "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia". Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang perlunya gagasan cerdas untuk dapat meningkatkan kesuksesan partai Islam. Gagasan tersebut adalah dengan menghadirkan partai ideologis, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai peserta pemilu yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam di indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa partai Islam belum memiliki prospek yang menggembirakan namun dengan kekonsistenan HTI dalam mengemban cita-cita syariat Islam memiliki peluang untuk menjadi partai ideologis di Indonesia.[1]
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Detri Soetiawan, dengan judul "Partai-Partai Islam dalam Pemilu 1999, Studi Kebijakan Presiden BJ. Habibie tentang Multi Partai". Pada penelitian ini minimnya perolehan kursi partai Islam di parlemen pada pemilu 1999 yang diselaraskan dengan kebijakan BJ Habibie selaku Presiden RI, tentang beberapa konsep demokrasinya yang kemudian tidak disia-siakan oleh kalangan

[1] Sudarno Shobron, "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol.14. No. 1 (Juni, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politisi Islam untuk kemudian mendirikan partai-partia Islam, hingga akhirnya dapat mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke empat dengan menanggalkan Megawati, meski dalam parlemen, kenyataannya masih kalah dengan partai-partai non Muslim seperti Golkar dan PDIP. Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu rekonstruksi imajinatif tentang sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis kejadian masa lalu berdasarkan data yang sudah ada.[2]

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Reslawati, dengan judul : "Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislative 2009 di DKI Jakarta". Penelitian ini difokuskan pada pandangan pemimpin ormas Islam terhadap perolehan suara partai politik Islam pada pemilu legislatif di DKI Jakarta. Dengan lokus kajian dilaksanakan di Propinsi DKI Jakarta, dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Kajian ini menghasilkan bahwa penyebab penurunan perolehan suara partai politik Islam antara lain: parpol Islam saat ini sangat pragmatis, tidak ideologis; Ada keinginan parpol Islam bergabung menjadi satu atau dua parpol Islam saja atau cukup mengosentrasikan pada parpol Islam yang sudah ada dan lolos elektoral treshold, agar potensi dan kosentrasi umat tidak terpecah belah; adanya signifikasi yang cukup tajam antara perolehan penurunan suara

[2] Detri Soetriawan, "Partai-Partai Islam dalam Pemilu 1999, Studi Kebijakan Presiden BJ. Habibie tentang Multi Partai" , (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parpol Islam dengan pengambilan keputusan parpol Islam di legislative, bila perolehan suara parpol Islam kecil, maka secara otomatis jumlah wakil parpol Islam di legislatif juga kecil.[3]

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah yang pertama pada metode penelitiannya. Metode penelitian metode historis yaitu rekonstruksi imajinatif tentang sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis kejadian masa lalu berdasarkan data yang sudah ada dan melalui metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan yang mencoba menggali sumber data memalui observasi lapangan terlebih dahulu, baru kemudian wawancara dan juga dokumentasi. Perbedaan selanjutnya adalah tujuannya. Ketiga penelitian di atas, yaitu penelitian yang pertama memiliki tujuan untuk perlunya diselenggarakannya gagasan syariat Islam HTI guna Prospek kesuksesan Partai Islam kedepan. Penelitian kedua bertujuan untuk meneliti pengaruh kebijakan Presiden Habibie sebagai wujud munculnya partai-partai Islam, meski memiliki hasil yang minim di parlemen namun dapat menghantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke empat pengganti Megawati. Selanjutnya penelitian ketiga bertujuan untuk mencari tahu pandangan pemimpin ormas Islam terhadap perolehan suara partai politik Islam pada pemilu

[3]Reslawati, "Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislative 2009 di DKI Jakarta", *Jurnal Puslitbang Kehidupan Keagamaan,* Vol.9 No.34 (April-Juni2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif di DKI Jakarta. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari tahu dan mengidentifikasi adanya kanibalisme dalam politik terhadap Partai Politik di kota Surabaya, yang difokuskan pada partai politik Islam yang hingga pemilu 2014 kemarin terdaftar sebagai peserta pemilu, yakni : PAN, PPP, PKS, PKB, dan PBB.

B. Kerangka Teori

Adapun beberapa kerangka teori dalam penelitian ini adalah :

1. Kanibalisme Politik

Peristiwa kanibalisme tanpa kita sadari telah terjadi dan sering dilakukan oleh diri kita sendiri, seperti misalnya : suka menggigit-gigit kuku, memakan rambut, kulit, dan darah sendiri. Atau kanibalisme yang terjadi karena paksaan, hal ini biasa terjadi dalam keadaan perang dimana seseorang dipaksa melakukan sebagai bentuk paksaan atau siksaan perang. Misalnya pada abad ke-enambelas, penjajah Spanyol memaksa penduduk pribumi memakan buah pelirnya sendiri, atau di Sudan pada tahun 1990, seorang pemuda dipaksa untuk memakan telinganya sendiri.[4]

Praktik kanibalisme ini seakan menjadi kebudayaan tersendiri. Orang melakukannya adakala memang dibenarkan keberadaannya sebagai norma sosial, pada situasi ekstrem kelaparan, atau dimaklumi sebagai bentuk kegilaan dan penyimpangan sosial. Adapun yang terakhir ini dibagi menjadi dua jenis, yakni : endo-kanibalisme (memakan orang dari komunitas sendiri), dan ekso-

[4]Julia Suryakusuma, *Jihad Julia : Pemikiran Kritis dan Jenaka Feminis Pertama di Indonesia*, (Bandung : Qanita, 2010), hal 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kanibalisme (memakan manusia dari masyarakat lain). Selain itu juga ada kanibalisme janin (lebih umum terjadi pada binatang daripada manusia), serta kanibalisme digunakan sebagai hiburan, ini biasanya dilakukan aktor sebagai akting di sebuah film. Seperti misalnya pada film "Sweeney Tood : The Demon Barber of Fleet Street" pada tahun 2007 yang diperankan oleh tokoh eksentrik internasional, Jhonny Deep.

Selain tersebut di atas, jenis kanibalisme yang tidak kalah ekstrem adalah kanibalisme politik, yakni : apabila seorang manusia dalam negara baik aktor maupun non-aktor "memakan" orang mereka sendiri. Ini diekspresikan sebagai cara hubungan kekuasaan terhadap orang tersebut. Peristiwa kanibalisme politik ini berdasarkan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu : hubungan sosial yang melibatkan intrik dengan tujuan mendapatkan otoritas atau kekuasaan.[5] Lebih khusus, selain istilah kanibalisme politik, terdapat istilah lain, yakni kanibalism caleg. Ini diutarakan oleh Sudiyatmiko Ariwibowo, seorang kuasa hukum dari PDIP untuk KPU dalam pemilu presiden 2014 kemarin, menyatakan bahwa : kanibalisme caleg merupakan Praktek pencurian suara antarcaleg di dalam satu partai .[6]

Menurut sumber lain disebutkan, bahwa kanibalisme politik adalah praktik saling memangsa di antara aktor-aktor politik dalam perebutan sumber daya ekonomi-politik, untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau

---

[5] *Ibid*, hal 157

[6]Sudiyatmiko Ariwibowo, "Kanibalisme Caleg Disebabkan Pengawasan yang Lemah". : http://www.rumahpemilu.org/in/read/7506/Sudiyatmiko-Aribowo-Kanibalisme-Caleg-Disebabkan-Pengawasan-yang-Lemah (24 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertarungan merebut kekuasaan. Perilaku saling memangsa di antara aktor-aktor politik ini mencerminkan mentalitas purba dan naluri primitif, merujuk doktrin kuno yang dipopulerkan oleh ahli filsafat sosial Herbert Marcuse: homo homini lupus (man is a wolf to man)—manusia adalah serigala pemangsa manusia lain.

Ungkapan ini menggambarkan bahwa dalam peradaban pri-mitif, manusia acap memakan dalam pengertian harfiah manusia lain, yang dikenal dengan tradisi kanibalisme. Dalam konteks peradaban modern, pertarungan merebut kekuasaan melahirkan kanibalisme politik dalam wujud korupsi di kalangan pemangku kekuasaan. Kanibalisme politik bertentangan dengan civic morality, yang menjadi basis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang beradab. Penting dicatat, kanibalisme politik dalam konteks pertarungan dan perburuan kekuasaan selalu bersifat nihilistik dengan prinsip zero sum game.[7]

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam

[7]Amich Al-Humami, "Korupsi dan Kanibalisme Politik", : http://www.suararakyat.co/2014/03/korupsi-dan-kanibalisme-politik.html (30 November 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasikan diri.

Menurut Miriam Budihardjo partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.[8]

Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo melihat partai politik sebagai organisasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi sekaligus mengapresiasikan dan mengatur konflik. Partai politik dilihat sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan serta secara organisatoris memiliki cabang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Arifin Rahman mengasosiasikan partai politik sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi melalui

[8]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta, PT . Gramedia Widisuasarana, 1992), hal. 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai konflik dan persaingan baik internal partai maupun antar partai yang terjadi secara melembaga dalam partai politik pada umumnya.[9]

A. A Said Batara & Moh. Dzulkiah mengemukakan dalam perspektif sosiologi politik, bahwa partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik, istilah partai politik biasa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.[10]

Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau klasifikasi. Klasifikasi itu dapat diketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi, serta basis tujuan dan sosial. Dari sisi asas dan orientasi, parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu :

1. Parpol pragmatis, yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
2. Parpol doktriner, ialah suatu parpol yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya.
3. Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

---

[9] Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional:* (Surabaya :SIC 2002), hal 91.

[10]A.A. Said Batara & Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik; Konsep & Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung : C.V Pustaka Setia, 2007), hal 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa definisi tersebut di atas membawa pada pemahaman bahwa partai politik adalah kumpulan orang yang terorganisir secara rapi dengan ideologi tertentu dan kepentingan untuk meraih kekuasaan dengan penuh persaingan. Ada empat kata kunci tentang partai politik, yakni ideology (*ideology*), kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*), dan persaingan (*competition*). Ideologi dan kepentingan (*interest*) suatu partai dapat mengidentifikasi dirinya dengan konstituennya. Ideologi sebagai landasan untuk menyusun program kerja, dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Bahkan visi dan misi, landasan dan prinsipprinsip perjuangan, serta cita-cita politik tidak lepas dari ideologi. Selain itu, setiap partai politik itu dilahirkan untuk meraih kekuasaan. Untuk dapat berkuasa, maka setiap partai politik harus bersaing (kompetisi) untuk meraih suara sebanyakbanyak dari masyarakat pemilih. Dalam kompetisi inilah sering tidak dapat dihindari gesekan-gesekan yang memicu terjadi konflik antar partai politik. Oleh karena itu dibuatkan aturan-aturan atau normanorma untuk meraih kekuasaan melalui undang-undang, sehingga kekuasaan yang nantinya didapat sudah melewati proses demokrasi yang transparan.

b. Tipologi Partai Politik

Menurut Ichlasul Amal, sekurang-kurangnya ada lima jenis partai politik dilihat dari tingkat komitmen terhadap ideologi, yaitu partai proto, kader, massa, diktatorial, dan partai *catch-all*. *Pertama*, partai proto adalah bentuk awal suatu partai di Eropa Barat pada abad pertengahan hingga akhir abad ke-19, sehingga tidak dapat dikatakan partai modern. Esensi dari partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membedakan antara anggota dan non-anggota. *Kedua*, partai kader merupakan jenis partai yang belum memberikan hak pilih kepada masyarakat umum, hanya mereka dari kalangan menengah ke atas yang memiliki hak. Partai ini tidak memerlukan anggota yang besar, sehingga tidak memobilisasi massa. *Ketiga*, partai massa adalah partai yang mementingkan kuantitas anggota dan berorientasi pada basis pendukung yang luas, lintas profesi, etnis dan agama. Tujuan utamanya adalah melakukan pendidikan politik rakyat. *Keempat*, partai diktatorial, yakni sub-tipe dari partai massa, hanya saja ideologinya dipegang secara kaku dan radikal, sehingga dalam rekrutmen anggota lebih selektif. Partai ini menuntut pengabdian secara total dari setiap anggotanya. *Kelima*, partai *catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggota partai.[11]

Sedangkan menurut Roy C.Macridis ada tujuh tipe partai politik, yakni otoriter dan demokratis, integratif dan representatif, ideologis dan pragmatis, agamis dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan elit, demokratis dan oligarkhi. Untuk membuat tipologi partai didasarkan pada tiga hal, yakni sumber dukungan partai, organisasi internal, dan tindakan.[12]

---

[11] Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hal. 31
[12] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Partai Islam

a. Sejarah Munculnya Partai Islam di Indonesia

sejarah munculnya partai politik Islam di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang desentralisasi tahun 1903, kala itu pemerintah Belanda memberikan hak kepada pemerintahan lokal di Hindia Belanda untuk membentuk satu Dewan Perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil-wakil dari "*the Color Caste System*", satu model yang sama dengan *Constitutional Democracy.* Ini terjadi pada tahun 1916, saat Gubernur Jenderal menyatakan bahwa sebagian anggota volksraad (Dewan Perwakilan) tetap ditunjuk dan sebagian lain dipilih. Maka dari itu untuk mengisi kursi yang dipilih, maka pada tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan dibolehkannya pembentukan partai politik pada tingkat nasional.

Mosi Tjokroaminoto dan Mosi Djajadiningrat pada November 1918 menuntut agar seluruh anggota Volksraad dipilih oleh rakyat. Akhirnya berbuah rakyat diperbolehkan secara bebas berserikat dan berkumpul, meski pada kenyataannya polisi rahasia tetap mengawasi kegiatan politik mereka. Setelah kejadian tersebut, di Indonesia tumbuh partai secara garis besar berkategori : 1). Partai keturunan Belanda, 2). Partai keturunan China, 3). Partai orang Indonesia. Kategori yang ketiga ini kemudian terbagi atas dua jenis yakni : partai Islam dan Non-Islam. Adapun partai Islam sendiri perjalanannya sepanjang era adalah :[13]

[13] Nuruddin'ITR, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta : LP3ES, 2003), hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Periode Pra-Kemerdekaan**

Pada era ini partai yang pertama dibangun oleh umat Islam adalah Sarekat Islam (SI) pada tanggal 11 November 1912 di Solo. Partai ini berasal dari sebuah organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Partai yang didirikan oleh H. Samanhudi ini pada awal perjalanannya sebagian besar dicurahkan pada masalah-masalah organisasi seperti : mencari pimpinan, menyusun anggaran dasar, dan hubungan antara organisasi pusat dengan organisasi daerah.[14]

Kemudian di era kepemimpinan Tjokroaminoto, Abdul Moeis, dan Agus Salim, SI mulai memasuki periode puncak dengan berhasilnya SI meluas hingga di seluruh nusantara pada tahun 1919, dengan jumlah anggota lebih dari setengah juta orang dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mampu membawa SI secara serius memperhatikan beberapa persoalan di bidang : agama, ekonomi, dan politik. SI membagi program kerjanya menjadi delapan bagian, yaitu : politik, pendidikan, agama, hukum, agraria, pertanian, keuangan, dan perpajakan.

SI melakukan perjuangan politik dengan ikut berpartisipasi di Volksraad meski ditentang oleh anggotanya, yakni Samaun (tokoh SI yang nantinya menjadi tokoh komunis). Di dalam Volksraad ini, Tjokroaminoto dan Moeis menjadi bintang karena tuntutan-tuntutannya yang sangat keras untuk memperluas hak-hak Volksraad, pembentukan dewan-dewan daerah dan perluasan hak pilih, penghapusan kerja paksa,

[14] *Ibid*, hal 26-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistem izin untuk bepergian. Namun kemudian pada periode keempat kelahirannya (1927-19942), SI gagal mempertahankan kejayaan posisinya sebagai pemain kunci dalam gerakan nasional karena berbagai faktor, yaitu *Pertama,* konflik internal di kalangan elite partai, seperti : kekecewaan seorang elite terhadap langkah politik yang ditempuh oleh elite lain, perbedaan pandangan antar elite, sehingga kerapkali berakhir dengan pengusiran seorang elite dari tubuh partai.

Cara inilah yang kemudian mengakibatkan SI secara perlahan mengalami krisis kepemimpinan dan melemahnya kondisi partai. *Kedua,* memudarnya kepercayaaan kelompok Islam lain terhadap SI. Oragnisasi-organisasi Islam lain seperti : Al-Irsyad, Muhammadiyah dari sayap modernis dan gejala semakin terorganisasinay golongan tradisionalis. Reputasi besar SI yang piawai dalam berorganisasi dapat meyakinkan semua kelompok Islam untuk memberikan kursi kepemimpinan umat dalam bidang agama kepada SI, sebagaimana tergambar dalam beberapa kali Kongres Al-Islam. Tapi karena merasa diperlakukan tidak wajar oleh pimpinan SI, akum tradisionalis menceraikannya, dan pertikaiannya dengan Muhammadiyah pada tahun 1926 membuat banyak warga Muhammadiyah keluar dari kenggotaan SI pada tahun selanjutnya. *Ketiga,* tantangan semakin besar terhadap kepemimpinan SI muncul dari kaum pergerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis dan komunis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Periode Pasca-Kemerdekaan / Orde Lama (1945-1965)**

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem kabinet presidensial yang mengacu pada UUD 1945. Seminggu kemudian, Soekarno menganjurkan dibentuknya suatu organisasi pembantu presiden namun juga melaksanakan fungsi partai dan fungsi parlemen, yaitu komite nasional yang akan didirikan di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama Presiden Soekarno juga menghendaki pembentukan partai tunggal, yaitu : Partai Nasional Indonesia (PNI). ide tersebut ditentang keras oleh para tokoh yang menginginkan kehidupan demokratis. Sultan Sjahrir adalah tokoh politik yang paling keras menolak ide yang menurutnya dapat menyeret Indonesia ke arah otoritanisme, karena itu ia kemudian memprakarsai adanya perubahan iklim politik dengan menggalang dukungan dari anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menuntut agar komite nasional dirombak sehingga juga mempunyai kekuasaan legislatif.

Sejak saat itu, Presiden harus berbagi kekuasaan dengan parlemen yang dikomandani oleh Sjahrir dan Amir Syariffuddin. Berbekal kekuasaan ini, Sjahrir mempelopori penggusuran sistem satu partai dan membangun sistem multi partai. Hal ini tertuang dalam maklumat tanggal 3 November 1945 yang ditandantangani oleh Muhammad Hatta, yang isinya menganjurkan pada ranyat untuk mendirikan partai politik untuk menyambut pemilu badan-badan perwakilan rakyat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bakal digelar pada Januari 1946. Dengan demikian, praktis sistem pemerintahan Indonesia bergeser dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer tanpa mengganti UUD 1945. Hal ini yang kemudian oleh Alfian membagi partai-partai yang muncul menjadi lima bagian, yaitu : Nasionalis, Islam, Komunis, Sosialis, dan Kristen/Nasrani.[15]

Keluarnya maklumat 1945 ini disambut dengan mengadakan kongres umat Islam Indonesia selama 2 hari di Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh lima ratus utusan organisasi-organisasi keagamaan Islam, tokoh-tokoh aliran ulama dan tokoh-tokoh politik Islam. Pada tanggal 7 November 1945, para peserta kongres menyepakati pembentukan partai Islam yang secara resmi dinamakan partai politik Islam Indonesia Masyumi. Yang dibentuk oleh sejumlah politisi dan pergerakan sosial keagamaan Islam Indonesia yang telah aktif sejak zaman penjajahan Belanda, diantaranya adalah : Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusaswito, Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Mawardi, dan Abu Hanifah.

Masyumi dicanangkan sebagai satu-satunya partai Islam yang akan menyalurkan dan mengartikulasikan kepentingan umat Islam. Hal ini diwujudkan dengan cara membentuk dua jenis keanggotaan yang diharapkan dapat menampung semua elemen Islam di masyarakat. Dua jenis keanggotaan tersebut adalah : perseorangan (biasa), dan organisasi

[15] Alfian, "Aliran Partai-partai Pasca Maklumat November 1945", dalam Peta Islam dalam Politik Pasca-Soeharto, Nuruddin'ITR (Jakarta : LP3ES, 2003), hal35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(istimewa). Adapun anggota perseorangan disyaratkan minimal berusia 18 tahun atau sudah kawin dan tidak menjadi partai lain, sedangkan anggota istimewa semula terdiri dari 4 organisasi, yakni : NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Namun jumlahnya terus bertambah dengan masuknya Persis (1948), Al-Irsyad (1950), dll.

Kebesaran Masyumi pada zamannya memang tidak diragukan lagi. Prestasi cemerlangnya adalah berhasilnya para tokohnya mengisi posisi sebagai menteri bahkan perdana menteri pada rentang tahun 1945-1957, pada pemilu 1955 mampu mendudukkan 4-5 anggota Mayumi dalam setiap kabinet. Namun sayang, seiring perjalanannya Masyumi gagal mempertahankan klaimnya sebagai satu-satunya partai Islam bersamaan dengan mengerasnya konflik internal antarfaksi yang berujung dengan pecahnya persatuan partai. Seperti pada tahun 1947, saat PSII keluar dari Masyumi karena berselisih paham mngenai kabinet Amir Syarifuddin yang ingin menyertakan Masyumi. Pada tahun 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi. Hingga akhirnya terjadi ktegangan antara Masyumi dan Sukarno yang berimbas dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus 1960.

Keppres ini melarang adanya keberadaan Masyumi dan PSI karena dituduh terlibat dalam pemberontakan separatis PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958. Setelah itu, Soekarno membubarkan semua partai politik, kecuali sembilan partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diantaranya NU, PSI, dan Perti. Namun keberadaan ketiga partai Islam tersebut nyaris tidak berguna karena sistem kepartaian pada demokrasi terpimpin bersifat "No Party System". Akibatnya negara demokrasi terpimpin digerogoti oleh aneka krisis politik dan ekonomi yang kemudian berujung pada hancurnya kekuasaan Soekarno.[16]

- **Periode Orde Baru (1966-1998)**

Runtuhnya rezim orde lama kemudian muncul orde baru, yakni sebuah rezim pemerintahan militer yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Ini berimplikasi pada gaya kepemimpinan Soeharto yang diktator dan mengakibatkan buntunya ruang gerak para pemimpin umat Islam dalam menegakkan panji-panji politik umat Islam di panggung politik nasional bukan hanya itu, politik Islam bahkan disejajarkan kedudukannya dengan komunisme melalui penamaan ekstrem kanan untuk politik Islam dan ekstrem kiri untuk komunis. Penamaan ini ikarenakan keinginan politik Islam untuk mendirikan sebuah negara Islam. Penilaian ini menjadikan politik islam menjdi musuh besar negara yang layak menerima intimidasi, penekanan, dan penganiayaan politik berkepanjangan.

Puncak kesewenang-wenangan Orba tampak pada pemilu 1971, dimana saat itu Golkar menjadi pemenang dan mendorong negara untuk mewujudkan pengelompokan-pengelompokan partai-partai politik yang baru, dan hanya akan diikuti oleh 3 partai politik. Dimana saat itu empat

[16] Nuruddin'ITR, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto,* (Jakarta : LP3ES, 2003), hal 36-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) berfusi menjadi satu partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagai partai ciptaan negara, PPP terjerat kesulitan dalam membenarkan kehadirannya di hadapan para pendukungnya, bahkan di depan dirinya sendiri. Sebab dalam diri PPP telah hilang kesadaran untuk bersatu akibat meruncingnya persaingan antarfraksi dalam mengedepankan agenda politik masing-masing, dan dalam mencapai cita-citanya membangun sebuah negara Islam atau mengenakan hukum Islam tidak dapat tercapai karena dikerangkeng oleh berbagai persyaratan kebijakan negara.

- **Periode Pasca Orde Baru / Refomasi**

Lahirnya partai Islam di Indonesia ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden dengan pemerintahan orde Barunya pada 1998 silam yang kemudian diganti dengan pemerintahan reformasi oleh BJ. Habibie. Pada era ini Habibie yang kala itu mewarisi pemerintahan Soeharto, negara berada pada kondisi yang berantakan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara, sehingga menimbulkan berbagai tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan. Oleh karena keadaan itu lah Habibie melakukan tindakan-tindakan "populer" guna mendongkrak legitimasinya dan pada saat yang sama memasang kuda-kuda untuk pertarungan memperebutkan kursi presiden periode berikutnya. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah : memberi kebebasan yang luar biasa terhadap dunia pers, membebaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahanan politik, dan narapidana politik, menggusur Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dari wacana politik Nasional, menghapus keharusan menggunakan asas Pancasila bagi orgaisasi masyarakat dan organisasi politik, mengeluarkan undang-undang otonomi daerah, serta kebebasan mendirikan partai politik bagi seluruh masyarakat dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu 1999.

Dua butir yang disebut terakhir sangat disambut masyarakat dengan suka cita. Terbukti bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, partai-partai dengan basis sosial besar dan kecil secara ideologis dapat dibelah menjadi dua bagian besar, yaitu : nasionalisme-religius, dan nasionalisme-skuler. Ini lah latar belakang yang melahirkan partai Islam di Indonesia.[17] Adapun menurut Saiful Mujani, menegaskan bahwa partai Islam di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. *Pertama,* partai yang berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman, seperti PKB dan PAN. *Kedua,* partai yang secara eksplisit ber*platform* Islam sebagai asas ideologi, seperti PKS, PPP, dan PBB.[18]

b. Syarat Berdirinya Partai Islam di Indonesia

Adapun indikasi yang melatarbelakangi dan syarat-syarat berdirinya partai Islam adalah : *Pertama*, umat Islam yang jumlahnya besar di Indonesia ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan

[17]Nurrudin, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto,* (Jakarta : LP3ES, 2003), hal. 59-60
[18] Saiful Mujani, "Tipologi Partai Islam", dalam *Artikel, Biyanto Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam,* http://www.jawapos.com/baca/artikel/7048/Kisruh-PPP-dan-Masa-Depan-Partai-Islam (13 Oktober 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orientasi politiknya. Diyakini bahwa masih banyak umat Islam yang memandang berpolitik itu bagian dari ibadah, dan mereka hanya mau menyalurkan ke partai politik Islam. *Kedua*, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik, dengan tidak meninggalkan jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki kekuasaan, maka dengan mudah untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar melalui undang-undang resmi negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda) dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat masyarakat. *Ketiga*, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga, maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah.

Keempat, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu *rahmatan lil'alamien*, hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang langsung dinikmati oleh masyarakat. *Kelima*, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam, dengan penampilan dan pemaknaan yang baru. *Keenam*, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidiq, amanah, tabligh dan fathanah.Dalam bahasa hadis, seorang pemimpin itu harus *dhabid* (cerdas) dan *ghairu syadz* (tidak cacat moral). Melihat realitas politik di Indonesia, apakah ada partai Islam ideologis yang bertarung dalam pemilu 2014 ? Melihat partai Islam yang mendaftar ke KPU dengan jelas tidak ada partai ideologis yang mengikuti pemilu, yang ada adalah partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam pargmatis yang hanya sekedar mencari kekuasaan belaka, bahkan kemungkinan melakukan praktek akuisisi partai politik tidak dapat dihindarkan. Partai politik yang tidak lolos verifikasi bisa jadi akan menjual KTP konstituennya kepada partai lain dalam rangka untuk memenuhi jumlah konsituten partai.[19]

c. Kemerosotan Suara Partai Islam

Akibat dari hal tersebut di atas adalah terjadi dilema politik Islam, dimana dilema ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :[20] *Pertama :* estimasi berlebihan dari kekuatan politik Islam. Para pemimpin politik Islam dengan bangga menunjuk Indonesia sebagai negara dengan penduduknya yang hampir 90% beragama Islam. Atas dasar itu mereka optimis mendapatkan suara mayoritas. Namun ternyata optimisme tersebut melenceng. Terbukti pada pemilu 1955 hanya 50% dari pemilih yang memilih partai Islam, selanjtnya pada pemilu 1971, 1977, 1982, dan 1987 perolehan suara menjadi naik turun menjadi : 27,11%, 29,29%, dan 27,28%. *Kedua,* terjadinya apa yang disebut ambivalensi atau definisi mendua tentang umat Islam. Para pemimpin umat Islam mengkalim bahwa umat Islam mencapai sekitar 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia, tapi penggunaan mereka atas kata "umat Islam" dalam konteks politik tidak tepat dan tidak pada tempatnya. Umat Islam disini mereka artikan

[19]Sudarno Shobron, "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia", *Jurnal Studi Islam,* Vol.14. No. 1 (Juni, 2013)
[20]Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hal 55-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai mereka yang secara formal menjadi anggota dan pendukung partai politik Islam, dengan demikian mereka mengesampingkan sejumlah orang yang menyatakan diri sebagai beragama Islam. *Ketiga,* belum adanya perkembangan pemikiran di kalangan pemimpin dan pemikir politik Islam mengenai hubungan yang pas antara agama dan politik dalam Islam.

Ini diterapkan pada Indonesia harusnya para pemimpin-pemimpin baik dari kalangan tradisionalsi maupun modernis, yang telah memilih sistem politik demokratis, hendaknya tetap memegang teguh demokrasi dengan tetap menggunakan nilai-nilai Islam.

4. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik merupakan bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengahmasyarakat sebagai konstituennya.[21] Bahwa StrategiKomunikasi Politik adalah rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Faktor-faktor dari proses komunikasi politik adalah meliputi :

[21] Zein Abdullah, *Strategi komunikasi Politik dan Penerapannya*. (Bandung : Simbiosa, 2008),hal 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Komunikator Politik

   Komunikator politik adalah Partisipan yang dapat menyampaikan atau memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik.

2. Pesan Politik

   Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan , baik secara tertulis maupun tidak tertulis , baik secara verbal maupun non-verbal,tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidakdisadari yang isinya mengandung bobok politik. Yaitu bagaimana agarsetiap pesan politik yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap anggota ataupun masyarakat.

3. Saluran atau Media politik

   Saluran atau media Politik adalah alat atau sarana yang dipergunakanoleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan politik nya.Dimana setiap kegiatan ataupun pesan yang ingin disampaikan olehpartai politik di tampilkan disetiap media politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sasaran atau Target Politik

   Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkandapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepadapartai atau kandidat dalam Pemilihan Legislatif.

5. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

   Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptany apemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum.

McNair memiliki lima fungsi dasar dalam melaksanakan strategi komunikasi politiknya, yakni sebagai berikut [22]:

1. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Disini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat. Indikatornya adalah :

a)Adanya penyampaian program-program partai yang bersentuhan terhadap kalangan bawah melalui berbagai media cetak atau elektronik.

2. Bagaimana mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Disini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada

[22]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, Strategi)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009) hal 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehinggaberusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut. Indikatornya adalah:

a) Informasi sebenar-benarnya mengenai janji parpol kepadamasyarakat.

b) Adanya upaya pembuktian janji setelah caleg terpilih dalampemilihan umum legislatif tahun 2009.

3. Bagaimana menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.

Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi. Indikatornya:

a) cara partai dalam menampung aspirasi masyarakat.

b) meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa menjadi penampungaspirasi masyarakat maupun aspirasi politik

4. Bagaimana membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah danlembaga-lembaga politik. Indikatornya adalah :

a) setiap program kerja yang ada dapat diketahui oleh pemerintah danpihak lainnya seperti masyarakat maupun lembaga-lembaga politiklainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagaisaluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-programlembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id